

Aksi Damai Diam di depan Istana Presiden – Kamisan ke-75

JSKK Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan

Jl. Bonang IA, Menteng, Jakarta Pusat 12870 Telp. 021-31931181 Fax. 021-3913473

Jakarta, 31 Juli 2008

Nomor : 47/Surat Terbuka_JSKK/VII/2008

Hal : **Mendorong Langkah Konkret Presiden dan Menolak Capres Pelanggar HAM**

Kepada Yth.

**Bapak H. Soesilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia**

Di- Jakarta

Dengan hormat,

Pada tanggal 26 Maret 2008, Bapak Presiden bertemu dengan para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Istana Kepresidenan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan komitmennya untuk segera menggelar rapat kabinet terbatas membahas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan juga akan segera meminta klarifikasi dari Jaksa Agung Hendarman Supanji atas *keengganannya* menyidik kasus pelanggaran HAM berat, serta dari Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono tentang pernyataan tidak perlunya pejabat TNI dan purnawirawan TNI memenuhi panggilan Komnas HAM. Di samping itu, Presiden juga menyatakan dukungannya untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan kasus Munr. Namun empat bulan lebih telah berlalu, komitmen tersebut masih jauh dari harapan.

Di lain kesempatan, baru-baru ini *Komisi Kebenaran dan Persahabatan RI – Timor Leste (KKP)* telah menyampaikan laporan akhirnya dalam forum resmi kenegaraan yang bertempat di Bali. Dalam laporan temuannya tersebut, KKP secara eksplisit menyebut sejumlah nama mantan petinggi militer Indonesia diduga terlibat dalam tragedi kemanusiaan di Timor Leste (Timor Timur kala itu) yang terjadi pada tahun 1999. Beberapa diantaranya adalah, Jend. (Purn) Wiranto (yang ketika itu menjabat sebagai Panglima TNI), Mayjen Zacky Anwar Makarim (Anggota Tim Pengamanan Penyuksesan Penentuan Pendapat Otonomi Khusus Timor Timur), Mayjen Kiki Syahnakrie (Panglima Komando Operasi Penguasa Darurat Militer Timor Timur), Mayjen Adam Rachmat Damiri (Pangdam Udayana), Kol. Suhartono Suratman (Danrem Wira Dharma, kini berpangkat Mayjen sebagai Panglima Kodam Tanjungpura), Mayjen (Purn) A. M. Hendropriyono (Menteri Tansmigrasi), dan Letjen (Purn) Prabowo Subianto. Keterlibatan nama-nama yang disebut di dalam laporan KKP tersebut tentu harus diselidiki lebih lanjut, dan hendaknya tidak hanya berhenti pada tanggungjawab kelembagaan TNI.

Bapak Presiden Yang Terhormat,

Kami berpendapat bahwa saat ini rakyat Indonesia tengah menyaksikan sebuah *dagelan* politik yang dimainkan secara cantik oleh para penyelenggara negara dan para mantan petinggi militer tersebut di atas. Lebih jauh lagi, beberapa mantan jenderal yang diduga terlibat dalam tragedi kemanusiaan di Timor Leste dan beberapa kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, tanpa penyesalan sedikitpun berencana mencalonkan dirinya menjadi Presiden RI untuk Pemilu 2009. Bersama surat ini kami sampaikan pula bahwa kami dengan tegas-tegas menolak calon presiden pelanggar HAM berat.

Hingga kini, kami masih terus mengharapkan Bapak Presiden dapat mewujudkan komitmennya dengan mengusut tuntas seluruh kasus pelanggaran HAM berat baik yang terjadi dimasa lalu dan sekarang, termasuk di antaranya peristiwa Timor Leste. Secara khusus kami berharap agar peristiwa Timor Leste tidak berhenti pada selesainya kerja KKP, tetapi yang lebih penting lagi, pemulihan hak bagi korban harus diberikan sesegera mungkin, jaminan bahwa peristiwa serupa tidak akan terjadi di masa depan, serta para pelaku harus dibawa ke pengadilan, termasuk mengusut keterlibatan nama-nama jenderal yang disebut dalam laporan KKP. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesungguhannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan

Sumarsih

Suciwati

Bejo Untung

Tembusan:

1. Bpk. Menteri Sekretaris Negara RI
2. Bpk. Ketua Komnas HAM

